



BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN BI DALAM PENGENDALIAN HARGA

SINERGI KEBIJAKAN, STABILITAS HARGA,
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



KEBIJAKAN MONETER

Menjaga stabilitas
inflasi & nilai tukar



KEBIJAKAN FISKAL

Subsidi, kompensasi,
dan bantuan pangan



STABILISASI PASOKAN

Ketersediaan &
kelancaran distribusi



KOORDINASI TPIP - TPID

Sinergi pusat & daerah
kendalikan inflasi



KOMUNIKASI EFEKTIF

Kelola ekspektasi,
bangun kepercayaan

OLEH

RUDY C TARUMINGKENG

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

7 April 2026

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN BI DALAM PENGENDALIAN HARGA

Abstrak

Makalah ini membahas arsitektur, instrumen, dan efektivitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian harga di Indonesia. Argumen utama makalah ini adalah bahwa pengendalian harga di Indonesia tidak dapat dibebankan hanya kepada kebijakan moneter BI atau hanya kepada kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah, melainkan harus dibaca sebagai kerja bersama yang menggabungkan sasaran inflasi, suku bunga kebijakan, stabilisasi nilai tukar, subsidi dan kompensasi, bantuan pangan, operasi stabilisasi pasokan, penguatan logistik, serta koordinasi pusat-daerah melalui TPIP dan TPID. Secara kelembagaan, sasaran inflasi 2025–2027 ditetapkan pemerintah sebesar $2,5 \pm 1$ persen melalui koordinasi dengan BI, sedangkan program pengendalian inflasi difokuskan pada strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Secara empiris, pada Maret 2026 inflasi Indonesia tercatat 3,48 persen (yoy), turun dari 4,76 persen pada Februari 2026 dan kembali berada dalam kisaran sasaran. BI menilai penurunan itu didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah melalui TPIP/TPID, dan

penguatan implementasi program ketahanan pangan. Di sisi pemerintah, kebijakan fiskal berperan sebagai *shock absorber* melalui subsidi dan kompensasi, bantuan pangan, serta stimulus musiman Ramadan–Idulfitri. Hingga 28 Februari 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp51,5 triliun, sementara pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan bagi 35 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp14,09 triliun dan paket stimulus transportasi untuk menjaga daya beli. Makalah ini menyimpulkan bahwa pengendalian harga di Indonesia pada dasarnya adalah upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas sinergi kebijakan, ketepatan sasaran intervensi, kemampuan mengelola inflasi pangan, serta kecepatan respons terhadap guncangan global dan domestik. ([Bank Indonesia](#))

Kata kunci: pengendalian harga, inflasi, Bank Indonesia, kebijakan pemerintah, TPID, TPID, subsidi, stabilisasi pangan, Indonesia

Kebijakan Pemerintah dan BI dalam Pengendalian Harga

Pendahuluan

Dalam perekonomian modern, harga bukan sekadar angka di pasar. Harga adalah sinyal ekonomi, ukuran daya beli, penentu perilaku konsumsi, dan sumber legitimasi kebijakan. Ketika harga-harga bergerak stabil, rumah tangga lebih mudah merencanakan konsumsi, dunia usaha lebih pasti membaca biaya dan permintaan, dan negara lebih mudah menjaga pertumbuhan. Sebaliknya, ketika harga melonjak, terutama pada pangan, energi, dan kebutuhan sehari-hari, tekanan sosial-ekonomi segera muncul. Karena itu, pengendalian harga di Indonesia harus dipahami bukan hanya sebagai isu teknis ekonomi, tetapi sebagai isu kesejahteraan, stabilitas

sosial, dan kredibilitas negara. Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya tercermin pada tingkat inflasi yang rendah dan stabil. BI juga menekankan bahwa sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga dari sisi penawaran dan kebijakan harga yang diatur pemerintah. ([Bank Indonesia](#))

Dalam konteks Indonesia, pengendalian harga memiliki kompleksitas yang tinggi karena perekonomian Indonesia merupakan ekonomi kepulauan yang besar, dengan disparitas wilayah, ketergantungan pada rantai pasok pangan, sensitivitas tinggi terhadap harga energi, serta struktur konsumsi rumah tangga yang masih sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pokok. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2026 inflasi tahunan Indonesia sebesar 3,48 persen, dengan inflasi tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh sebesar 5,31 persen dan terendah di Lampung sebesar 1,16 persen. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa persoalan harga di Indonesia tidak cukup dibaca secara nasional semata, melainkan juga membutuhkan pendekatan regional dan koordinasi daerah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, kebijakan pengendalian harga di Indonesia berkembang menjadi sebuah arsitektur yang melibatkan banyak institusi. Bank Indonesia mengelola inflasi dari sisi permintaan, ekspektasi, suku bunga, nilai tukar, dan komunikasi kebijakan. Pemerintah mengelola sisi penawaran, subsidi, distribusi, konektivitas, bantuan sosial, dan stabilisasi pangan. Keduanya bertemu dalam mekanisme koordinasi formal seperti Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada saat yang sama, pengendalian harga juga dikaitkan dengan sasaran pertumbuhan, perlindungan daya beli, dan stabilitas fiskal. Dengan demikian, membahas kebijakan pemerintah dan BI dalam pengendalian harga berarti membahas bagaimana negara Indonesia bekerja sebagai satu sistem. ([Bank Indonesia](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa pengendalian harga di Indonesia hanya akan efektif bila dibangun di atas tiga lapis yang saling terkait. Lapis pertama adalah kerangka moneter yang kredibel, terutama penargetan inflasi dan pengelolaan ekspektasi. Lapis kedua adalah kebijakan pemerintah yang menjaga pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga melalui instrumen fiskal dan sektor riil. Lapis ketiga adalah sinergi kelembagaan pusat-daerah yang memungkinkan kebijakan nasional diterjemahkan menjadi tindakan operasional di lapangan. Dengan menggunakan sumber resmi dari Bank Indonesia, BPS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, makalah ini menjelaskan bagaimana arsitektur tersebut bekerja, apa capaian sementara, serta tantangan yang masih dihadapi sampai awal April 2026. ([Bank Indonesia](#))

Kerangka Kelembagaan Pengendalian Harga

Secara formal, pengendalian harga di Indonesia berangkat dari penetapan sasaran inflasi. Bank Indonesia menjelaskan bahwa sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah dengan berkoordinasi dengan BI untuk periode tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 31 Tahun 2024, sasaran inflasi untuk 2025, 2026, dan 2027 ditetapkan masing-masing sebesar 2,5 persen dengan koridor ± 1 persen. Artinya, kisaran sasaran operasional berada pada 1,5 persen hingga 3,5 persen. Kerangka ini penting karena memberi jangkar ekspektasi bagi rumah tangga, dunia usaha, dan pasar keuangan. Pengendalian harga dengan demikian bukan reaksi spontan terhadap gejolak bulanan, melainkan usaha menjaga inflasi tetap dekat dengan sasaran yang telah diumumkan secara terbuka. ([Bank Indonesia](#))

Di sisi kelembagaan, pengendalian inflasi diperkuat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di pusat dan daerah. BI menjelaskan bahwa TPI di tingkat pusat terbentuk sejak 2005, kemudian diperkuat dengan TPI di tingkat daerah sejak 2008. Landasan hukum koordinasi ini diperkuat

melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), yang melahirkan TPIP, TPID provinsi, dan TPID kabupaten/kota. Dalam kerangka ini, pemerintah bertanggung jawab mengelola ekspektasi inflasi dan aspek penawaran seperti pasokan, distribusi, konektivitas, rantai perdagangan, serta subsidi, sementara BI menjaga sisi moneter dan stabilitas makro. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, desain pengendalian harga di Indonesia memang bersifat *whole-of-government*, bukan semata *central bank approach*. ([Bank Indonesia](#))

Program pengendalian inflasi di Indonesia difokuskan pada strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini penting karena mencerminkan pemahaman bahwa harga yang stabil tidak cukup dicapai melalui pengetatan permintaan. Negara juga harus memastikan barang tersedia, distribusi lancar, dan masyarakat memperoleh komunikasi yang jelas agar ekspektasi inflasi tetap terkendali. Dalam praktiknya, 4K menjadi jembatan antara kebijakan makro dan tindakan lapangan, misalnya operasi pasar, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkut, penguatan gudang dan logistik, serta penyampaian informasi harga dan pasokan kepada publik. ([Bank Indonesia](#))

Pada awal 2026, kerangka tersebut diperbarui dan dipertegas melalui High Level Meeting TPIP. Pemerintah dan BI menyepakati tiga sasaran pokok: menjaga inflasi 2026 pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen, menjaga inflasi harga bergejolak (*volatile food*) pada kisaran 3,0–5,0 persen, dan memperkuat koordinasi pusat-daerah untuk pengendalian inflasi pangan. Dalam pernyataan resmi BI, pencapaian inflasi 2025 sebesar 2,92 persen yang berada dalam sasaran disebut sebagai bukti keberhasilan sinergi kebijakan antara pemerintah dan BI. Ini penting karena menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak dipahami sebagai target yang terpisah dari pertumbuhan, melainkan sebagai bagian dari stabilitas makro yang mendukung pertumbuhan itu sendiri. ([Bank Indonesia](#))

Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Harga

Peran BI dalam pengendalian harga berangkat dari strategi *inflation targeting* yang dijalankan dalam kerangka *Flexible Inflation Targeting Framework*. BI menjelaskan bahwa kerangka ini mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal, dan penguatan koordinasi kelembagaan. Sasaran akhirnya tetap sama: menjaga inflasi sesuai target. Namun BI juga mengakui bahwa stabilitas harga saja tidak cukup; bank sentral juga perlu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan transmisi kebijakan bekerja. Karena itu, pengendalian harga oleh BI tidak hanya dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, tetapi melalui bauran kebijakan yang lebih luas. ([Bank Indonesia](#))

Instrumen paling terkenal tentu adalah BI-Rate. BI menjelaskan bahwa BI-Rate merupakan sinyal utama respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Dalam mekanisme transmisi, perubahan BI-Rate memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, lalu memengaruhi kredit, konsumsi, investasi, nilai tukar, harga aset, dan akhirnya tekanan inflasi. Ketika inflasi berisiko naik terlalu tinggi, BI dapat memperketat kebijakan. Sebaliknya, ketika inflasi terkendali, BI memiliki ruang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan. Pada Maret 2026, BI mempertahankan BI-Rate di 4,75 persen sambil menegaskan bahwa bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. ([Bank Indonesia](#))

Selain suku bunga, BI juga sangat menekankan peran nilai tukar dalam pengendalian harga. Dalam mekanisme transmisi, BI menjelaskan bahwa perubahan suku bunga dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya memengaruhi harga barang impor dan tekanan inflasi. Dalam siaran Maret 2026, BI menegaskan akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. Pada 16 Maret 2026, rupiah tercatat Rp16.985 per dolar AS, dan BI melihat perlunya kebijakan pre-emptive untuk mencegah pelemahan nilai tukar berubah menjadi tekanan inflasi yang lebih luas, terutama melalui harga impor, energi, dan pupuk. ([Bank Indonesia](#))

Peran BI berikutnya adalah komunikasi kebijakan. BI menyatakan bahwa komunikasi kebijakan moneter bertujuan memengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi, serta mengurangi ketidakpastian ke depan. Dalam pengendalian harga, komunikasi ini penting karena inflasi sering kali tidak hanya didorong oleh faktor riil, tetapi juga oleh ekspektasi. Jika masyarakat percaya harga akan melonjak, maka perilaku belanja, penetapan harga, dan negosiasi upah dapat memperkuat inflasi. Karena itu, setiap kali inflasi bergerak naik, BI selalu berusaha menjelaskan sumber tekanan, sifatnya sementara atau tidak, dan arah respons kebijakan. ([Bank Indonesia](#))

Hal ini tampak jelas pada episode inflasi Februari 2026. Dalam analisis resminya, BI menegaskan bahwa inflasi IHK Februari 2026 sebesar 4,76 persen (yoy) yang berada di atas kisaran sasaran lebih dipengaruhi oleh *low base effect* inflasi Februari 2025 yang sangat rendah, terutama akibat kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. BI juga menunjukkan bahwa inflasi inti hanya 2,63 persen (yoy), sementara tekanan terutama berasal dari kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Dengan menjelaskan struktur inflasi semacam ini, BI berupaya mencegah publik membaca kenaikan headline inflation sebagai tanda bahwa semua harga sedang lepas kendali. Komunikasi seperti ini adalah bagian penting dari pengendalian harga itu sendiri. ([Bank Indonesia](#))

Pada Maret 2026, BI kembali menegaskan efektivitas pendekatan tersebut. Inflasi turun menjadi 3,48 persen (yoy), kembali masuk ke kisaran sasaran. BI menyatakan bahwa inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, eratnya sinergi pengendalian inflasi antara

BI dan pemerintah melalui TPIP/TPID, serta penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa BI tidak melihat dirinya bekerja sendirian; bank sentral justru menempatkan kebijakan moneternya sebagai salah satu bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas. ([Bank Indonesia](#))

Peran Pemerintah dalam Pengendalian Harga

Jika BI lebih dominan pada sisi permintaan, ekspektasi, nilai tukar, dan stabilitas moneter, maka pemerintah memainkan peran sentral pada sisi penawaran dan keterjangkauan harga. BI sendiri menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan pasokan, distribusi barang, konektivitas, rantai perdagangan, dan subsidi. Dalam praktik Indonesia, peran ini sangat penting karena banyak gejolak harga justru muncul dari gangguan pasokan pangan, distribusi antardaerah, kenaikan biaya logistik, atau perubahan harga barang yang diatur pemerintah. Karena itu, pemerintah menjadi aktor utama dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan harga yang sangat menentukan daya beli masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

Salah satu instrumen terpenting pemerintah adalah kebijakan fiskal sebagai *shock absorber*. Dalam paparan APBN KiTa per 28 Februari 2026, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN berperan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global. Hingga 28 Februari 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp51,5 triliun. Paparan itu juga menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga ketersediaan barang bersubsidi seperti BBM, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, pupuk, dan dukungan KUR, sambil mengakui bahwa realisasi subsidi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik. Dengan kata lain, APBN dipakai bukan hanya untuk membiayai program pembangunan, tetapi juga untuk menahan guncangan harga agar tidak langsung sepenuhnya ditransfer ke rumah tangga. ([Kemenkeu Media](#))

Instrumen berikutnya adalah bantuan pangan dan stimulus daya beli. Pada awal 2026, pemerintah menyiapkan bantuan pangan bagi 35 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp14,09 triliun. Media Keuangan Kementerian Keuangan secara eksplisit menyebut bahwa penyaluran bantuan pangan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian harga pangan. Ini menunjukkan bahwa bagi pemerintah, kebijakan sosial dan kebijakan pengendalian harga tidak dipisahkan secara tegas; keduanya saling menopang. Bantuan pangan bukan hanya instrumen proteksi sosial, tetapi juga instrumen stabilisasi harga dan permintaan rumah tangga miskin pada saat tekanan pangan meningkat. ([Media Keuangan](#))

Pemerintah juga menggunakan stimulus musiman untuk mengurangi tekanan harga pada momentum tertentu. Menjelang Lebaran 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus melalui APBN 2026 untuk memperkuat daya beli dan kelancaran mobilitas selama Ramadan dan Idulfitri. Media Keuangan menekankan bahwa diskon transportasi dan kebijakan pendukung lainnya dimaksudkan sekaligus untuk menopang pertumbuhan ekonomi awal tahun. Di sini tampak logika kebijakan yang penting: pengendalian harga bukan hanya berarti "menahan" kenaikan harga, tetapi juga mengurangi beban biaya yang ditanggung rumah tangga pada saat permintaan meningkat secara musiman. ([Media Keuangan](#))

Di tingkat koordinasi ekonomi nasional, pemerintah juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi dijalankan bersama stimulus musiman. Dalam HLM TPIP awal 2026, pemerintah menyatakan kesiapan menyiapkan stimulus Ramadan dan Idulfitri, termasuk diskon transportasi, diskon tarif tol, dan bantuan pangan. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga inflasi 2026 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen dan inflasi pangan pada 3,0–5,0 persen. Dari sini terlihat bahwa kebijakan fiskal dan sektor riil tidak diposisikan sebagai pelengkap pasif kebijakan BI, tetapi sebagai instrumen aktif pengendalian harga. ([Ekon](#))

Pengendalian Harga Pangan sebagai Inti Kebijakan

Dalam pengalaman Indonesia, harga pangan adalah titik paling sensitif dalam pengendalian harga. BI menegaskan bahwa tekanan inflasi di Indonesia banyak datang dari sisi penawaran, terutama produksi dan distribusi barang, serta barang yang termasuk kelompok *administered prices*. Karena itu, pemerintah dan BI memberi perhatian khusus pada inflasi pangan. Pada awal 2026, mereka menetapkan sasaran inflasi *volatile food* di kisaran 3,0–5,0 persen. Penetapan target khusus ini menunjukkan bahwa harga pangan bukan sekadar komponen inflasi biasa, tetapi arena kebijakan tersendiri. ([Bank Indonesia](#))

Penguatan sisi pangan itu kemudian diterjemahkan melalui GPIPS, yaitu Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. BI menjelaskan bahwa GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya yang dikenal sebagai GNPIP. Program baru ini lahir karena tantangan ketahanan pangan dan inflasi pangan dianggap semakin kompleks. GPIPS membawa tiga pembaruan pokok: penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan terutama menghadapi cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan jangka pendek, dan penguatan sinergi pusat-daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah. Dalam GPIPS Sumatera 2026, BI dan para pemangku kepentingan juga menekankan pentingnya efisiensi logistik, optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD), penguatan BUMD pangan sebagai *offtaker*, serta penguatan manajemen risiko inflasi regional. ([Bank Indonesia](#))

Di sini terlihat bahwa pengendalian harga pangan di Indonesia telah bergeser dari pendekatan yang semata reaktif menuju pendekatan yang lebih struktural. Pemerintah dan BI tidak hanya mengandalkan operasi pasar ketika harga sudah naik, tetapi juga memperkuat produksi, pembiayaan pertanian, logistik, perlindungan usaha tani, dan konektivitas pasokan antarwilayah. Dalam GPIPS Sumatera 2026, misalnya, kesepakatan strategis juga mencakup antisipasi risiko cuaca ekstrem, perlindungan

usaha tani dan pascapanen, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan semakin dipahami sebagai agenda ketahanan pangan, bukan hanya agenda stabilisasi jangka pendek. ([Bank Indonesia](#))

Namun demikian, aspek jangka pendek tetap penting. Dalam koordinasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, BI dan pemerintah menekankan stabilisasi harga di pasar, penguatan distribusi, konektivitas pasokan regional, dan penguatan manajemen risiko inflasi regional. Langkah seperti ini relevan karena tekanan harga pangan di Indonesia sering kali bersifat musiman, terutama menjelang Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru. Dengan demikian, pengendalian harga pangan di Indonesia selalu bekerja dalam dua horizon sekaligus: jangka pendek untuk memadamkan gejolak, dan jangka menengah untuk memperbaiki struktur pasokan. ([Bank Indonesia](#))

Sinergi Kebijakan pada Awal 2026

Awal 2026 memberikan studi kasus yang baik untuk membaca sinergi kebijakan pemerintah dan BI. Inflasi Januari 2026 sebesar 3,55 persen (yoy), naik menjadi 4,76 persen pada Februari, lalu turun ke 3,48 persen pada Maret. BPS mencatat inflasi Maret secara bulanan sebesar 0,41 persen dan secara tahun kalender 0,94 persen, sementara inflasi inti Maret tercatat 2,52 persen (yoy). Penurunan dari Februari ke Maret menunjukkan bahwa tekanan harga yang sempat membesar pada Februari tidak berkembang menjadi episode inflasi yang lebih persisten. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

BI menilai episode Februari itu terutama dipengaruhi *low base effect* serta kenaikan tekanan pada *administered prices* dan *volatile food*. Dalam analisis Februari 2026, BI menegaskan bahwa inflasi 2026 secara tahunan diyakini akan menurun dan tetap berada dalam kisaran sasaran, didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, eratnya sinergi TPIP/TPID, penguatan ketahanan pangan, dan berakhirnya pengaruh *base effect* dari diskon tarif

listrik awal 2025. Di sini terlihat bahwa BI tidak hanya merespons dengan narasi moneter, tetapi juga secara eksplisit menyandarkan prospeknya pada kerja bersama dengan pemerintah. ([Bank Indonesia](#))

Di sisi pemerintah, Kementerian Keuangan pada awal April 2026 menyatakan bahwa inflasi IHK Maret 2026 tetap terkendali di sekitar 3,5 persen (yoy), menurun dibanding Februari 4,8 persen, terutama karena penurunan inflasi pada seluruh komponen, khususnya *administered prices* dan *volatile food*. Pemerintah juga mengaitkan stabilitas ini dengan kebijakan menjaga daya beli, subsidi, bantuan pangan, dan stimulus konsumsi selama Ramadan–Idulfitri. Dengan kata lain, baik BI maupun pemerintah membaca penurunan inflasi Maret sebagai hasil interaksi kebijakan, bukan keberhasilan satu pihak saja. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Narasi Kasus: Tiga Wajah Pengendalian Harga

Kasus pertama adalah pengendalian harga energi. Bagi jutaan rumah tangga Indonesia, stabilitas harga BBM, LPG, dan listrik memiliki arti langsung bagi biaya hidup. Kenaikan harga energi dengan cepat menular ke ongkos transportasi, harga pangan, dan biaya produksi. Karena itu pemerintah menggunakan subsidi dan kompensasi sebagai alat *shock absorber*. Sampai akhir Februari 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp51,5 triliun, dengan volume BBM bersubsidi, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, dan pupuk yang tetap dijaga. Kebijakan ini memang mahal secara fiskal, tetapi dari sudut pengendalian harga, ia berfungsi sebagai bantalan agar gejolak global tidak sepenuhnya diteruskan ke konsumen domestik. ([Kemenkeu Media](#))

Kasus kedua adalah pengendalian harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pada periode ini, permintaan rumah tangga cenderung naik, mobilitas meningkat, dan risiko kenaikan harga pangan membesar. Pemerintah dan BI merespons dengan kombinasi penguatan distribusi, koordinasi pasokan, bantuan pangan, diskon transportasi, dan penguatan kerja sama antardaerah. BI dalam GPIPS Sumatera 2026 bahkan

menegaskan pentingnya stabilisasi harga di pasar dan penguatan manajemen risiko inflasi regional. Kasus ini menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak cukup dilakukan melalui satu instrumen tunggal; ia memerlukan intervensi simultan pada pasokan, distribusi, permintaan, dan ekspektasi. ([Bank Indonesia](#))

Kasus ketiga adalah pengelolaan persepsi publik ketika inflasi naik sementara. Pada Februari 2026, headline inflation menembus 4,76 persen, tetapi BI segera menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah *low base effect* dan kenaikan *administered prices*, sedangkan inflasi inti tetap terkendali. Penjelasan ini penting karena tanpa komunikasi yang baik, publik dapat mengira bahwa seluruh struktur harga sedang tidak terkendali. Dalam pengendalian harga modern, menjaga narasi sama pentingnya dengan menjaga pasokan. Jika komunikasi keliru, ekspektasi inflasi dapat memburuk dan justru memperparah tekanan harga. ([Bank Indonesia](#))

Evaluasi: Seberapa Efektif Kebijakan yang Ditempuh?

Secara umum, kebijakan pemerintah dan BI dalam pengendalian harga menunjukkan efektivitas yang cukup baik hingga awal April 2026. Bukti paling nyata adalah bahwa setelah lonjakan Februari, inflasi Maret 2026 kembali ke 3,48 persen, masuk ke dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen. BI secara resmi menyatakan bahwa inflasi tetap terjaga dan meyakini inflasi 2026–2027 akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran. Ini menunjukkan bahwa kerangka penargetan inflasi, respons moneter, dan koordinasi dengan pemerintah masih bekerja. ([Bank Indonesia](#))

Namun efektivitas itu tidak berarti tanpa biaya dan tanpa batas. Penggunaan subsidi dan kompensasi memang membantu menahan harga, tetapi sekaligus menimbulkan tekanan fiskal. Kementerian Keuangan sendiri mengakui bahwa realisasi subsidi dipengaruhi fluktuasi ICP, depresiasi rupiah, dan peningkatan volume konsumsi energi. Artinya, stabilitas harga energi yang dinikmati rumah tangga sering kali ditopang

oleh penyerapan risiko ke dalam APBN. Ini dapat diterima sebagai kebijakan stabilisasi, tetapi memerlukan tata kelola fiskal yang kuat agar tidak berubah menjadi beban permanen yang mengurangi ruang belanja produktif lain. ([Kemenkeu Media](#))

Di sisi lain, efektivitas pengendalian harga pangan masih sangat tergantung pada kapasitas logistik, ketahanan pasokan domestik, dan koordinasi antardaerah. Fakta bahwa inflasi Maret 2026 tetap menunjukkan disparitas besar antardaerah—dengan Aceh 5,31 persen dan Lampung 1,16 persen—menunjukkan bahwa stabilitas nasional belum berarti keseragaman stabilitas di tingkat lokal. Ini menjelaskan mengapa TPID, kerja sama antardaerah, dan penguatan infrastruktur pasokan terus menjadi prioritas. Indonesia pada dasarnya masih menghadapi tantangan klasik ekonomi kepulauan: harga nasional adalah hasil dari banyak pasar lokal yang struktur biayanya sangat berbeda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan ke Depan

Tantangan pertama adalah volatilitas global. BI pada Maret 2026 mencatat bahwa tekanan inflasi global meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen dan perang di Timur Tengah memperburuk kondisi eksternal. BI juga menilai rupiah perlu terus dijaga dari dampak global tersebut. Ini berarti pengendalian harga di Indonesia tetap akan berada dalam bayang-bayang harga energi dunia, pupuk, komoditas pangan global, dan nilai tukar. Selama struktur ekonomi domestik masih sensitif terhadap komoditas global, kebijakan pengendalian harga akan terus memerlukan kewaspadaan makro. ([Bank Indonesia](#))

Tantangan kedua adalah cuaca ekstrem dan risiko produksi pangan. GPIPS 2026 secara tegas memasukkan mitigasi cuaca ekstrem, perlindungan usaha tani, dan pemulihan lahan terdampak bencana sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan ke depan akan semakin terkait dengan adaptasi iklim. Jika

gangguan produksi semakin sering, maka intervensi pasar jangka pendek tidak akan cukup; pemerintah perlu membangun sistem pangan yang lebih tangguh dari hulu sampai hilir. ([Bank Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah ketepatan sasaran intervensi. Bantuan pangan, subsidi, dan program stabilisasi harus benar-benar menjangkau kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga. Jika intervensi terlalu luas dan tidak presisi, beban fiskalnya tinggi tetapi dampak sosial-ekonominya tidak optimal. Sebaliknya, jika terlalu sempit atau terlambat, maka gejolak harga keburu merusak daya beli rumah tangga. Karena itu, tantangan kebijakan ke depan bukan hanya memperbesar intervensi, tetapi memperhalus desainnya. ([Media Keuangan](#))

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, BI perlu terus mempertahankan kredibilitas sasaran inflasi melalui bauran kebijakan yang jelas, terutama pada suku bunga, stabilisasi nilai tukar, dan komunikasi ekspektasi. Episode Februari 2026 menunjukkan bahwa penjelasan yang cepat dan akurat tentang sumber inflasi dapat mencegah salah persepsi publik. Dalam ekonomi modern, kredibilitas komunikasi adalah bagian dari instrumen kebijakan. ([Bank Indonesia](#))

Kedua, pemerintah perlu terus menggeser pengendalian harga pangan dari pola reaktif menuju pola preventif-struktural. Ini berarti penguatan produksi, pembiayaan pertanian, irigasi, cadangan pangan, logistik, kerja sama antardaerah, dan teknologi informasi harus menjadi bagian inti dari agenda pengendalian harga, bukan sekadar pelengkap. GPIPS adalah langkah penting ke arah itu, dan perlu diterjemahkan secara konsisten di berbagai wilayah. ([Bank Indonesia](#))

Ketiga, subsidi dan kompensasi perlu tetap dipertahankan sebagai alat stabilisasi, tetapi dengan disiplin fiskal dan ketepatan sasaran yang lebih kuat. Subsidi yang menjaga harga energi atau pupuk bisa sangat penting dalam periode gejolak, tetapi reformasinya tetap perlu diarahkan agar

ruang fiskal tidak terus menyempit. Pengendalian harga yang baik adalah yang mampu melindungi masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan fiskal secara berlebihan. ([Kemenkeu Media](#))

Keempat, TPIP dan TPID harus diperkuat bukan hanya sebagai forum rapat, tetapi sebagai mesin eksekusi kebijakan harga di daerah. Disparitas inflasi antardaerah menunjukkan bahwa pengendalian harga di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah memantau pasar, mempercepat distribusi, menggunakan data pasokan, dan berkoordinasi dengan pusat. Ke depan, kualitas pengendalian harga nasional akan sangat ditentukan oleh kualitas kapasitas daerah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Penutup

Makalah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan BI dalam pengendalian harga di Indonesia dibangun melalui arsitektur yang kompleks tetapi relatif koheren. BI menjaga sasaran inflasi melalui suku bunga, nilai tukar, bauran moneter-makroprudensial, dan komunikasi kebijakan. Pemerintah menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi, bantuan pangan, stimulus daya beli, penguatan pasokan, logistik, dan stabilisasi harga pangan. Keduanya disinergikan dalam kerangka TPIP–TPID dan strategi 4K. Secara empiris, kombinasi ini terbukti cukup efektif, terlihat dari inflasi Maret 2026 yang turun ke 3,48 persen dan kembali masuk ke kisaran sasaran setelah lonjakan Februari. ([Bank Indonesia](#))

Namun efektivitas itu tetap rapuh bila tidak terus diperbarui. Pengendalian harga di Indonesia akan selalu menghadapi tekanan dari energi global, nilai tukar, pangan, cuaca ekstrem, dan disparitas wilayah. Karena itu, kebijakan pengendalian harga tidak boleh berhenti pada operasi jangka pendek. Ia harus berkembang menjadi strategi ketahanan ekonomi yang menggabungkan stabilitas moneter, ketahanan pangan, disiplin fiskal, dan kapasitas logistik nasional. Dengan kata lain, pengendalian harga yang baik bukan sekadar kemampuan menahan inflasi bulan ini, melainkan kemampuan negara memastikan bahwa masyarakat tetap hidup dalam

ruang ekonomi yang terjangkau, dapat diprediksi, dan produktif. ([Bank Indonesia](#))

Glosarium

Administered prices: kelompok barang dan jasa yang harganya dipengaruhi atau diatur oleh pemerintah, seperti BBM tertentu, listrik, dan beberapa tarif transportasi. BI menegaskan bahwa kelompok ini dapat menjadi sumber tekanan inflasi yang penting. ([Bank Indonesia](#))

BI-Rate: suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal arah kebijakan moneter untuk memengaruhi inflasi dan stabilitas makroekonomi. ([Bank Indonesia](#))

Flexible Inflation Targeting Framework (Flexible ITF): kerangka kebijakan moneter BI yang menggabungkan sasaran inflasi dengan perhatian pada stabilitas sistem keuangan dan koordinasi kebijakan yang lebih luas. ([Bank Indonesia](#))

GPIPS: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, yaitu penguatan dari GNPIP yang menekankan penguatan sisi hulu, stabilisasi jangka pendek, dan sinergi pusat-daerah. ([Bank Indonesia](#))

GNPIP: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, program kolaboratif BI dan pemerintah untuk mengendalikan tekanan harga pangan. ([Bank Indonesia](#))

Inflasi: kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. BI menegaskan bahwa inflasi yang rendah dan stabil penting bagi kesejahteraan masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

KAD (Kerja Sama Antardaerah): mekanisme kerja sama pasokan antarwilayah untuk memperkuat rantai pasok pangan dan mengurangi disparitas harga. ([Bank Indonesia](#))

Shock absorber fiskal: fungsi APBN dalam menyerap guncangan harga dan daya beli, misalnya melalui subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial. ([Kemenkeu Media](#))

TPIP: Tim Pengendalian Inflasi Pusat, forum koordinasi pusat dalam pengendalian inflasi. ([Bank Indonesia](#))

TPID: Tim Pengendalian Inflasi Daerah, tim di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memantau dan menyiapkan langkah pengendalian inflasi di daerah. ([Bank Indonesia](#))

4K: strategi utama pengendalian inflasi yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. ([Bank Indonesia](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 April). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen.*

Bank Indonesia. (2026). *Moneter.*

Bank Indonesia. (2026). *Inflation.*

Bank Indonesia. (2026, 30 Januari). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga inflasi 2026.*

Bank Indonesia. (2026, 11 Februari). *Fokuskan ketahanan pangan, GPIPS jadi strategi baru jaga inflasi.*

Bank Indonesia. (2026, 12 Maret). *Analisis inflasi Februari 2026.*

Bank Indonesia. (2026, 18 Maret). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.*

Bank Indonesia. (2026, 25 Maret). *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2026.*

Bank Indonesia. (2026, 1 April). *Inflasi IHK Maret 2026 tetap terjaga.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 11 Maret). *Konferensi pers APBN KiTa Februari 2026.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 1 April). *Pemerintah jaga stabilitas dan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.*

Media Keuangan Kementerian Keuangan. (2026, 3 Maret). *Stimulus Ramadan–Idulfitri 2026, pemerintah kucurkan bantuan pangan bagi 35 juta keluarga penerima manfaat.*

Media Keuangan Kementerian Keuangan. (2026, 16 Maret). *Diskon transportasi momen Lebaran: Jaga daya beli topan pertumbuhan ekonomi.*

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026, 3 Januari). *HLM TPIP: Pemerintah dorong penguatan pengendalian inflasi serta siapkan stimulus HBKN Ramadan dan Idulfitri.*

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026, 3 Februari).
*Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, inflasi terkendali, neraca
perdagangan surplus, dan sektor manufaktur melanjutkan ekspansi.*

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026, 12 Februari). *Sinergi
TPIP dan TPID wilayah Sumatera perkuat pengendalian inflasi jelang
Ramadan dan Idulfitri serta pemulihan ekonomi pascabencana.*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 7 April
2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d4b1d7-91a0-839b-8cb9-b5d86c596a23>